

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SIAK (STUDI DI DESA PERAWANG
BARAT KECAMATAN TUALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Pekanbaru

**LIZA ARYANI
NPM: 157110021**

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

**PEKANBARU
2021**

PERSEMBAHAN

*Samudra yang luas berawal dari sungai-sungai kecil
Seorang ahli butuh ribuan asumsi hanya untuk melahirkan satu teori
Hal yang besar pun lahir dari sesuatu yang kecil*

*Awali tujuan hidup dengan mimpi
Karena mimpi yang akan melahirkan impian.
Sebab Impian adalah jembatan menuju kesuksesan
Dan keyakinan merupakan kunci dari kesuksesan*

*Saya tidak pernah memikirkan kegagalan
karena memikirkan kegagalan sama dengan merencanakannya
kegagalanku adalah batu loncatan menuju sukses
Ku indahkan kegagalan itu menjadi madu kesuksesan
Karena saya yakin bahwa keindahan sedang menanti sebuah perjuangan*

*KESUKSESAN HIDUP adalah mendapatkan KEBAHAGIAAN Kunci
Kebahagiaan adalah seberapa besar kita bersyukur akan nikmat-NYA.
Semakin kita bersyukur, semakin pula kita Bahagia*

***“BERUNTUNGLAH ENKAU JIKA TERMASUK DALAM GOLONGAN
ORANG-ORANG YANG SELALU BERSYUKUR”***

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (Studi Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang)"**.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL bersama jajarannya yang telah menyediakan dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliaupimpin.
2. Bapak Dr. H. Syahrul Akmal Latiet, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini dan bapak/ibu serta saudar/saudari segenap stat dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian skripsi ini.

6. Kepala Desa Perawang Barat yang memberikan izin pengambilan data serta informasi kepada penulis terkait dengan penelitian ini.
7. Ayahanda **Amijar** dan Ibunda tercinta **Suryati** atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti. Kepada adek tercinta **Tuti Yolanda** yang selalu suport selama pembuatan skripsi
8. Kepada teman-teman Nadia, Sindy, Saibudinar, Sakinah yang selalu menemani bimbingan skripsi

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis

LIZA ARYANI

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
SURAT PERNYATAAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	11
1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik.....	11
2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik.....	14
3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik	16
4. Konsep Program	18
5. Konsep Implementasi Program.....	19
6. Konsep Bantuan Stimulan Rumah Swadaya	26
B. Kerangka Pikir	29
C. Konsep Operasional.....	30

D. Operasional Variabel	32
E. Teknik Pengukuran	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Populasi dan Sampel	37
D. Teknik Penarikan Sampel	38
E. Jenis dan Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data	39
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	40

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak	42
B. Gambaran Umum Kecamatan Tualang.....	47
C. Gambaran Umum Desa Perawang Barat	51

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden.....	55
1. Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	55
2. Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	56
3. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
B. Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Dan Perumahan Kabupaten Siak Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang	58
1. Pengorganisasian	59
2. Aspek Interpretasi	63
3. Penerapan atau Aplikasi.....	66
C. Pembahasan	69

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 71
B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel I. 1. Jumlah Kepala Keluarga miskin di Desa Perawang barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2017-2019	6
Tabel I.2 Keadaan Penerima Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya dengan dilihat dari Tingkat Kerusakan rumah tahun 2018.....	6
Tabel II.1 Operasional variabel mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang ...	32
Tabel III.1 Populasi Dan Sampel Pelaksana	37
Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang	41
Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	55
Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	57
Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Tabel V.4 Tanggapan Responden Tentang Indikator Pengorganisasian Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	60
Tabel V.5 Tanggapan Responden Tentang Indikator Aspek interpretasi Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	63
Tabel V.6 Tanggapan Responden Tentang Indikator Penerapan atau Aplikasi Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan	

Perumahan Swadaya Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak..... 67

Tabel V.7 Rekapitulasi tanggapan responden tentang Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Dan Perumahan Kabupaten Siak Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang..... 69



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1	Kerangka pikir tentang Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang.....	30
-------------	--	----



DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Kuisisioner / Angket Penelitian 75
Lampiran 2	Daftar Wawancara Penelitian..... 83
Lampiran 3	Telly Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (Studi Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang). 87
Lampiran 4	Dokumentasi Penelitian 89
Lampiran 5	Surat Penetapan Dosen Pembimbing 92
Lampiran 6	Surat Rekomendasi Riset 93
Lampiran 7	Surat Rekomendasi Riset 94
Lampiran 8	Surat Keterangan Penelitian..... 95
Lampiran 9	Surat Telah Melakukan Penelitian 96
Lampiran 10	Surat Keterangan Plagiasi 97

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liza Aryani
Npm : 157110021
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Program Bantu Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan pernyataan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memnuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Juli 2021
Pelaku pernyataan

Liza Aryani

Analisis Pelaksanaan Program Bantu Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Liza Aryani
Npm. 157110021

Abstrak

KATA KUNCI : Analisis, Pelaksanaan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan Program Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, Kecamatan Tualang, Desa Perawang Barat, Program Promosi Perumahan Swadaya dan untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Didesa Perawang Barat KecamatanTualang. Indikator yang digunakan meliputi pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan atau aplikasi. Tipe penelitian yang berlokasi di Kantor Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ini adalah penelitian kuantitatif. Data angka berasal dari hasil kuesioner dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui hasil sebaran kuesioner dan wawancara penelitian. Kemudian data sekunder berupa buku-buku literature dan internet sesuai data yang diperlukan. Pada analisis data disajikan dalam bentuk uraian tulisan, yang mana akan dianalisis menggunakan metode deskriptif atau penjabaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Pelayanan Publik Pada Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis pada hasil akhir tergolong pada kategori cukup baik yaitu dengan jumlah total 108 denga rata-rata sebanyak 36 dengan persentasi sebesar 53.73%. Hal ini terlihat dari persentasi responden di dominasi oleh jawaban cukup baik sebanyak 20 orang responden dengan persentase sebesar 50 %. Hal lain juga diketahui bahwa Pinggir menempati gedung baru yang masih membutuhkan pembangunan terkait fasilitas pendukung pelayanan masyarakat. Kantor desa Pinggir sistem kerja sudah menggunakan komputerisasi. Hal ini bermaksud untuk memudahkan pekerjaan dan mengamankan data-data penting kantor desa Pinggir. Salah satu unsur pelayanan yang diberikan oleh kantor Desa Pinggir dalam membangun rasa kedekatan dengan masyarakat sehingga dapat memberikan kenyamanan pada masyarakat. Keramahan dan ketegasan dalam menghadapi masyarakat yang ingin cepat dilayani dengan penyelesaian dalam waktu dekat dan memberikan pengertian kepada masyarakat untuk mengantri dan bersabar.

Analysis of the Implementation of Self-Help Housing Stimulant Program in Perawang Barat Village, Tualang District, Siak Regency

*Liza Aryani
npm. 157110021*

Abstract

Keywords: Analysis, Implementation, Self-help Housing Stimulant Assist

The purpose of this study was to find out about the implementation of the Public Works Program, Spatial Planning, Housing and Settlements, Tualang District, West Perawang Village, Self-Help Housing Promotion Program and to determine the inhibiting factors for the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program by the Public Works, Spatial Planning, People's Housing and Residential Areas of Siak Regency in West Perawang Village, Tualang District. The indicators used include organization, interpretation, and application or application. The type of research located at the Perawang Barat Village Office, Tualang District, Siak Regency is a quantitative research. Numerical data derived from the results of questionnaires and interviews. The sampling technique used in this research is saturated sampling. The data of this study were sourced from primary data obtained through the distribution of questionnaires and research interviews. Then secondary data in the form of literature books and the internet according to the required data. In the analysis of the data presented in the form of a description, which will be analyzed using a descriptive method or elaboration. Based on research conducted on Public Services in Pinggir Village, Pinggir District, Bengkalis Regency, the final results are classified in the fairly good category, with a total of 108 with an average of 36 with a percentage of 53.73%. This can be seen from the percentage of respondents who are dominated by enough answers as many as 20 respondents with a percentage of 50%. It is also known that the edge of the new building still requires construction related to community service support facilities. The village office at the edge of the work system already uses computerization. This is intended to facilitate the work and important data of the Pinggir village office. One of the services provided by the Pinggir Village office is to build a sense of closeness to the community so that it can provide comfort to the community. Friendliness and firmness in dealing with people who want to be served quickly with a solution in the near future and provide the expected results for queuing and waiting.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perumahan dan pemukiman merupakan fenomena yang berkembang dan berkelanjutan karena selalu mengikuti dinamika pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, Pemenuhan kebutuhan papan atau perumahan merupakan aspek yang penting mengingat fungsi rumah yang sangat vital sebagai tempat tinggal, sementara di lain hal, jumlah lahan yang tersedia terbatas sehingga menyebabkan suply dari kebutuhan ini juga terbatas sehingga menyebabkan harga kebutuhan ini tidaklah terjangkau

Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan di Indonesia, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk turut serta memenuhi kebutuhan dasar perumahan di daerahnya. Hal ini berdasarkan Peraturan Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian tugas pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten / Kota / Kota, yang menunjukkan bahwa pembangunan perumahan merupakan tugas wajib pemerintah daerah. Kerja kolaboratif yang akan diselesaikan oleh Asrama dan Permukiman, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota / Kota. Penyuluhan perumahan dan perumahan pelayanan dasar merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan khyakimliks daerah kota / kota. Merespon otoritas dan tanggung

jawab tim untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang layak, Pemerintah Kabupaten Siak Menjalankan Program Rehabilitasi Miskin Perumahan (RTLH) dari Kementerian Perumahan Rakyat melalui Program Bantuan dan Swadaya Insentif (BSPS).

Jenis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pasal 7 Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK). Pembangunan rumah baru (PB) adalah membangun perumahan di daerah yang sudah matang. BSPS diberikan stimulan pertumbuhan baru dalam bentuk dana atau bantuan lain untuk mendorong pembangunan rumah baru oleh masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan kualitas (PK) adalah perbaikan atau perluasan unit rumah untuk menambah atau memenuhi kebutuhan rumah. Pemberian stimulan BSPS dalam bentuk dana atau bantuan lain untuk mendorong upaya peningkatan kualitas hidup cacat yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi.

Adapun proses pengusulan penerima Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah :

1. Unit Pengelola Keuangan/Badan Keswadayaan Masyarakat melakukan pendataan MBR atau berdasarkan pendataan yang disampaikan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan stimulan;
2. Pendataan menggunakan formulir;

3. Hasil pendataan diumumkan selama 7 (tujuh) hari kerja di Kantor Kepala Desa/Kelurahan menggunakan formulir terlampir;
4. Hasil pengumuman dibuat berita acara hasil pengumuman dengan bentuk berita acara terlampir;
5. UPK/BKM menetapkan calon penerima bantuan stimulan dengan menandatangani daftar untuk setiap lembarnya dan disetujui oleh kepala desa/kelurahan.

Kriteria calon penerima / mata kuliah Menteri Perumahan Rakyat 13 / PRT / M / 2016 Menerima dana bantuan insentif perumahan swadaya bantuan stimulan perumahan swadaya :

1. Warga negara Indonesia
2. Menurut Kementerian Sosial, MBR yang berpenghasilan lebih rendah dari UMR, rata-rata nasional atau miskin.
3. Sudah berkeluarga
4. Memiliki atau menguasai tanah
5. Belum memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni
6. Belum pernah mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk mereka yang mengalami bencana alam, kebakaran, atau keresahan sosial.

Prioritas bagi mereka yang berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah:

1. Memiliki keswadayaan dalam bentuk tabungan bahan bangunan.
2. Telah mulai membangun rumah sebelum Anda mendapat bantuan yang

mengganggu

3. Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS; atau Cukup untuk diri Anda sendiri dalam bentuk tabungan yang bisa digunakan sebagai alat tambahan untuk BSPS;
4. Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan perumahan swadaya; dan
5. Dapat bekerja secara kelompok.

Kriteria bantuan untuk Peningkatan Kualitas (Rumah), Kriteria objek bantuan meliputi:

1. Rumah tidak layak huni yang berada di atastanah
 - a. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya
 - b. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi
 - c. tidak dalam status sengketa
 - d. penggunaannya sesuai tata ruang
 - e. Kondisi bangunan memenuhi kriteria berikut:
2. bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV
3. bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan

Keluarga penerima bantuan dengan membentuk kelompok yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan tujuan :

1. Membentuk panitia ketua dan mengusulkan pengangkatan kepala desa / lurah, serta mengumumkan kesiapannya untuk mengambil tindakan swadaya.

2. Membuka buku rekening kelompok penerima sasaran dibank.
3. Melakukan penilaian bagian rumah yang akan diperbaiki.
4. Menetapkan toko atau orang yang menjamin dalam penyediaan material bangunan.
5. Mengajukan usulan kebutuhan perbaikan rumah beserta dana yang diperlukan
6. Ketua tim memberikan laporan akhir tentang gambar dan laporan keuangan setiap rumah yang telah direnovasi.

Pelaksanaan program insentif perumahan swadaya sebagai salah satu program nasional selama masa otonomi daerah didasarkan pada prinsip desentralisasi. Dekonsentrasi adalah asas yang mengimplikasikan pengalihan beberapa fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah di bawahnya. Dengan demikian, menjadi soal kepercayaan penuh atas tanggung jawab daerah dalam hal kebijakan, kebijakan perencanaan dan pelaksanaan, serta pendanaan daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan BSPS kewenangan yang meliputi penegakan, pengawasan dan pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota, tetapi pada biaya wirausaha atau perolehan dana untuk perumahan. Namun dalam pengadaan biaya atau dana untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Namun jika dana dari pemerintah pusat tidak mencukupi untuk membiayainya, maka dapat menggunakan dana APBD atau menerima dana dari CSR dengan mengajukan proposal.

Kabupaten Siak, salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang mendapat bantuan insentif perumahan mandiri. Kabupaten Siak telah menerima stimulan perumahan swadaya sejak 2016. Antara tahun 2016-2020, sekitar 4 kabupaten di Provinsi Kabupaten Siak menerima BSPS.

Desa Perawang Barat merupakan salah satu desa berpenghasilan rendah di Kabupaten Siak, Kabupaten Tualang. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sumber penghidupan bagi masyarakat. Sebagian besar masyarakat di Desa Perawang Barat adalah petani, sehingga wajar saja jika kehidupan masyarakat di Desa Perawang Barat seperti sekarang ini. Kabupaten Siak, Desa Perawang Barat, Kabupaten Tualang, jumlah kepala keluarga miskin adalah sebagai berikut.

Tabel I.1 Jumlah Kepala Keluarga miskin di Desa Perawang barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga Miskin
1	2017	709 Kepala Keluarga	355 Kepala Keluarga
2	2018	728 Kepala Keluarga	386 Kepala Keluarga
3	2019	741 Kepala Keluarga	428 Kepala Keluarga

Sumber : Kantor Desa Perawang barat , 2019

Sejalan dengan hal diatas, Desa Perawang barat merupakan salah satu desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang cukup banyak mendapatkan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.2 Keadaan Penerima Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya dengan dilihat dari Tingkat Kerusakan rumah tahun 2018

No	Jenis Kerusakan Rumah			Persentase (%)		
	Tingkat Kerusakan	Usulan (kk)	Penerima (kk)	Yang tidak menerima (kk)	Penerima	Yang Tidak Menerima
1	Berat	41	27	14	65,86%	34,14%
2	Sedang	17	11	6	64,70%	35,29%

3	Ringan	9	4	5	44,44%	55,56%
Jumlah		67	42	25		

Sumber : Kantor Kepala Desa Perawang Barat, 2019

Dari data diatas bahwa jumlah penerima bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya di Desa Perawang Barat dari tingkat kerusakan ringan, sedang dan berat sebanyak 65% dari jumlah yang diusulkan oleh Kepala Desa. Hal ini terlihat bahwa Kepala Desa kurang selektif dalam memilih calon penerima bantuan karena masih ada yang ditolak oleh pihak dinas.

Menurut di atas, hal tersebut tidak dimaksudkan untuk melaksanakan perumahan swadaya di Desa Perawang Barat. masih ada nama di luar sana yang perlu dibantu, tetapi tidak terlalu membantu. Hal ini terlihat dari tingkat kerusakan perumahan. Prioritas harus diberikan kepada mereka yang rumahnya rusak parah, pertama dan terutama kepada mereka yang rumahnya rusak parah. Selain itu, penulis juga menemukan sejumlah kejadian yang terjadi di lapangan:

1. Bantuan insentif swadaya (BSPS) bukan tujuan yang jelas. Terlihat bahwa ada rumah yang lebih nyaman untuk ditolong tetapi tidak terlalu mendapatkan bantuan. Berdasarkan data yang penulis dapat bahwa terdapat 14 rumah yang dalam keadaan rusak tidak menerima bantuan sedangkan rumah yang tingkat kerusakannya ringan mendapat bantuan tersebut.
2. Belum meratanya penerima Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut. 65% dari jumlah keseluruhan dapat dilihat meskipun rumah yang rusak parah tidak layak untuk dihuni.

3. Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Swadaya di Desa Perawang Barat, berupa Peningkatan Kualitas Bantuan (PK). Namun, karena banyaknya pelaksana Pembangunan Baru (PB) di daerah tersebut, hal ini menyebabkan pengabaian terhadap perumahan karena keterbatasan dana masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (Studi di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penulis di atas, maka rumusan masalah dalam pekerjaan ini adalah sebagai berikut: bagaimana pelaksanaan program perumahan swadaya oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Perumahan Kabupaten Siak Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan Program Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, Kecamatan Tualang, Desa Perawang Barat, Program Promosi Perumahan Swadaya
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Didesa Perawang Barat KecamatanTualang
2. Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pengetahuan Penulis dalam ilmu sosial dan politik khususnya Bidang Kemasyarakatan, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Jasa Komputasi, Tualang, Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang
 - b. Bagi mahasiswa yang ingin lebih banyak meneliti tentang Bidang Kemasyarakatan, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Jasa Komputasi, Kecamatan Tualang, Desa Perawang Barat, Program Promosi Perumahan Swadaya

- c. Sebagai masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan program insentif pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan perumahan swadaya serta Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

Secara etimologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafri (2012;3) bahwa administrasi berasal dari bahasa latin ad dan ministrare, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta administration yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”.

Ilmu administrasi adalah salah satu spesialisasi ilmu yang sosial yang mempelajari tentang kerja sama manusia dalam mencapai tujuan. Administarasi dalam arti sempit adalah kegiatan ketatausahaan atau pekerjaan tulisan menulis, sedangkan pengertian administrasi secara luas (dalam Syafri 2012:4) Artinya, proses (rangkaiian) kerja organisasi sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif.

Begitu sempitnya penafsiran tentang administrasi pada zaman dahulu. Namun seiring berjalannya waktu, ilmu ini terus berkembang dan memiliki banyak penafsiran dikalangan para ahli. Sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2008;2), Administrasi didefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Hamin dan Indra Muchlis Adnan (2005:8-9), dalam literatur sampai saat ini, arti administrasi beraneka ragam, tergantung dari sudut mana ahli yang bersangkutan melihatnya, Beberapa pendapat tentang definisi administrasi dari beberapa orang ahli, yaitu:

- a. Leonard. D. White : Administrasi merupakan satu proses kerjasama yang terdapat pada semua usaha kelompok, pemerintah maupun swasta, sipil mau pun militer, skala besar maupun kecil.
- b. James D. Mooney: Administrasi adalah bentuk setiap pers ikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan.
- c. Chester I. Bernad : Administrasi adalah suatu sistem tentang aktivitas kerja sama dari dua orang atau lebih sesuatu yang tidak berwujud dan tidak bersifat pribadi, sebagai bsar mengenal hal hubungan–hubungan.
- d. Rapl Cuuier Davis : Administrasi adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang berkerja kearah tujuan bersama dibawak kepemimpinan.
- e. Robert V. Prestthus: Administrasi adalah suatu sistem susunan hubungan antara pribadi.
- f. Herliegh: Administrasi adalah perbuatan atau proses penghimpunan atau mengatur kelompok –kelompok yang saling berhubungan dari instansi menjadi suatu keseluruhan yang berkerja.
- g. . H.A. Simon dkk: Administrasi sebagai kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuanbersama.
- h. Willim H. Newman: Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan , kepemimpinan dan pengawasan dari pada usaha-usaha kelompok

individu-individu tercapainya tujuan bersama.

Sedangkan menurut The Liang Gie (dalam Harbani Pasolong 2016:3) mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang didalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Nawawi (dalam Syafiie, 2003;5) mendefinisikan bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasamasekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Siagian (2008:5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan dari dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara teoritik pengertian administrasi melayani secara intensif, sedangkan secara etimologis administrasi dalam bahasa inggris” Administer” yaitu kombinasi dari kata latin yang terdiri kata Ad dan minisrare yang berarti “ to serve” melayani membantu dan memenuhi. Lebih jelas lagi dari kata Ad artinya intensif sedangkan Ministe berbentuk kata benda yang berarti , melayani membantu atau mengarahkan (Sagala,2007;40).

Atmosudirjo dikutip (Zulkifli, 2005;17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan tearah yang berlangsung untuk memimpin dan mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahanan urusan yang berlangsung didalamnya.

Selanjutnya Zulkifli (2005;24) menyatakan Administrasi bertitik tolak dari teori batasan konsep administasi baik dalam arti sempit maupun luas (keseluruhan proses kerjasama),menunjukkan adanya sejumlah aspek untuk menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektifitas dan efesien organisasi, aspek-aspek yang di dimaksud meliputi:

- a. Organisasi
- b. Manajemen
- c. Kepemimpinann
- d. PengambilankeputusanHumanRelation.
- e. Informasi
- f. SumberDaya

Dengan demikian administasi adalah proses (tahapan) kerja organisasi sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Pelaksanaan administrasi yang baik akan menentukan keberhasilan suatu Negara untuk menjalankan dan menentukan kualitas administrasi yang dijalankan oleh negara tergantung kepada sumber daya manusia yang dimilikinya. Kumpulan sumber daya tersebut membentuk suatu kesatuan yang dinamakan sebagai organisasi

2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

Administrasi dan organisasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan administrasi mengarahkan pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien,dan organisasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan.

Organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *organon* dan istilah Latin *organon* yang dapat berarti alat, bagian, anggota atau badan. Organisasi adalah sasaran atau alat mencapai tujuan dalam literatur sampai saat ini menurut Hamid dan Indra Muchlis Adnan (2005;13-14), arti organisasi beraneka ragam, yaitu sebagai berikut:

- a. Dwight Waldo : Struktur hubungan antara organisasi, sistem pemerintahan, secara formal, tradisional dan adat. John M. Gaus: Urutan hubungan antara organisasi, orang-orang dan orang-orang yang memungkinkan mereka untuk menciptakan tujuan bersama dengan pembagian tanggung jawab dan tanggung jawab.
- b. G.R Terry: Organisasi adalah struktur yang terdiri dari bagian-bagian dan diturunkan dari kata *organisme*, yang digabungkan untuk hubungannya dengan keseluruhan.
- c. Leonard D. White: Organisasi adalah model hubungan yang ditetapkan oleh hukum dan eksekutif puncak. Organisasi adalah serangkaian kemitraan bisnis yang tersisa dari kemitraan jangka panjang.
- d. Herbert A. Simon: Organisasi adalah pola komunikasi yang kompleks dan hubungan lain didalam suatu kelompok manusia.

Menurut Sarwono (dalam Zulkifli, 2005;134) organisasi adalah sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu

organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Gitosudarmo (2000;1) organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dalam pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri. Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran (Riva'i, 2012;169-170). Selanjutnya Menurut Siagian (2008; 6), organisasi adalah segala bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan dalam suatu hubungan dimana satu atau lebih orang hadir. pemimpin dan sekelompok orang di bawah kendalinya.

3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik

Defenisi manajemen menunjukan secara Eksplisit Esensialnya penataan terhadap sumberdaya organisasi. Tergambar pada rumusnya yang dikemukakan oleh The Liang Gie (dalam Zulkifli,2005; 16-17), sebagai berikut:

- a. Perencanaan adalah proses yang menentukan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana mencapainya.
- b. Pembuatan keputusan adalah proses yang menentukan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana mencapainya.

- c. Pengarahan adalah memerintahkan bawahan, memberi instruksi, mendorong etos kerja, menjaga disiplin, memberi peringatan, dan melakukan upaya lain ke arah yang telah ditentukan.

Pengkoordinasian adalah menyatukan orang dan tugas, memastikan dan mencegah keterpaduan atau keterpaduan keputusan, kebijakan, tindakan, langkah, dan sikap kekosongan konflik, kebingungan, kembar, dan tindakan.

- a. Pengontrolan adalah pekerjaan yang berusaha untuk menyesuaikan dengan rencana, perintah, instruksi dan aturan yang diatur dalam pekerjaan dan hasil.
- b. Kesempurnaan adalah meningkatkan semua aspek organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Sementara menurut Sondang P. Siagian (2008; 05), mengatakan bahwa Manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penetapan tujuan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Sedangkan menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli ,2005; 28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pembuatan keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian

- e. Pengawasan
- f. Penyempurnaan

Menurut George R. Terry fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan (Planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengendalian (controlling). Menurut Henry Fayol (Safroni, 2012;47), fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing) pengarahan (commanding), pengkoordinasian (coordinating), pengendalian (controlling). Sedangkan menurut Ricki W. Griffin fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan (planning and decision making), pengorganisasian (organizing), pengarahan (leading) serta pengendalian (controlling).

Dengan demikian, tata kelola berasal dari organisasi dan manajemen, karena tata kelola merupakan alat utama dalam penyelenggaraan organisasi dan tata kelola.

4. Konsep Program

Solihin (2009;71) mengatakan bahwa program merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki durasi waktu tertentu serta dibuat untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan.

Selanjutnya Umar (2005;15) program atau program-program disusun dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan. Program pada hakikatnya adalah kumpulan proyek dalam hal ini proyek bisa disamakan dengan program.

Kemudian Sugiyono (2005;10) mendefenisikan progm adalah suatu rangkaian intruksi-intruksi dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer yang disusun secara logis dan sistematis.

5. Konsep Implementasi Program

Ini diidentifikasi sebagai desain yang sejalan dengan prinsip dan upaya yang akan dibuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Arif Rohman Jones (2009: 101-102) mengemukakan bahwa program ini adalah bagian dari politik. Program adalah upaya otoritatif untuk mencapai program. Menurut Charles O. Jones (Kota Erna Latifi Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar dalam menjalankan program ini, yaitu:

a. Pengorganisasian

Diperlukan struktur organisasi yang jelas untuk membangun sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas dalam pelaksanaan program.

b. Interpretasi

Pelaksana perlu menjalankan program sesuai dengan spesifikasi teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

c. Penerapan atau aplikasi

Program kerja harus menetapkan prosedur kerja tertentu agar berjalan sesuai dengan rencana kerja agar tidak bertentangan dengan program lain.

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones (1991: 296) dapat dilihat dari 3 (tiga) perspektif, yaitu:

a. Aspek interpretasi

Penjelasan adalah upaya untuk memahami apa yang dimaksud politisi dan untuk mengetahui dengan tepat apa tujuan akhirnya dan bagaimana itu harus dilaksanakan. Tafsiran Charles O. Jones dalam Widodo (2009: 90) menjelaskan bahwa kebijakan abstrak interpretasi adalah sebuah langkah untuk menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang lebih layak secara teknis.

Jones mengutip pendapat Edwards III sebagai berikut :

"Syarat pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan harus dilaksanakan dengan baik, arahan pelaksanaan tidak hanya harus diterima, tetapi mereka juga harus jelas. Jika mereka tidak, pelaksana akan bingung tentang apa yang harus mereka lakukan, dan mereka akan memiliki keleluasaan untuk memaksakan pandangan mereka sendiri tentang pelaksanaan kebijakan, pandangan yang mungkin berbeda dari atasan mereka".

Mereka yang mengambil keputusan perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi kebingungan tentang apa yang akan dilakukan oleh pembuat kebijakan, sehingga pembuat kebijakan dapat mengetahui dengan pasti tujuan apa yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan.

Sementara itu, Charles O. Jones mengatakan, selain memiliki standar yang jelas, langkah selanjutnya adalah mengembangkan sarana untuk mengimplementasikannya. Bergantung pada bagaimana

para eksekutif menjalankan tugasnya, yang paling penting dari mereka adalah proses di mana pelaksana dieksplorasi dan ketersediaan sumbernya. Di bawah ini adalah penjelasan dari Charles O. Jones:

“standar yang jelas juga harus diterapkan, yang involes, setidaknya, suatu proses dimana pelaksana belajar bahwa standar dan mengembangkan sarana untuk applying itu. Dimana standar tidak jelas, namun pelaksana dihadapkan dengan tanggungjawab Havier. Wheter dan bagaimana mereka memikul tanggung jawab ini tergantung pada banyak kondisi. Tentunya salah satu yang paling dari ini adalah estimasi pelaksana dari sumber daya yang tersedia”.

Berdasarkan penjelasan kriteria penjelas yang diuraikan, Charles O. Jones menekankan pada penjelasan pembuat kebijakan sebagai berikut :

“ bahwa pelaksana harus menanggapi pertanyaan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Mengganggu banyak orang, menjamin frustasi bagi pikiran rapi mencari penutupan dalam proses kebijakan. Hal ini tidak mengherankan, karena itu formula untuk administrasi yang baik atau pelaksanaan yang efektif dikembangkan. Biasanya formula ini menekankan kejelasan, ketepatan, konsistensi, penentuan prioritas, sumber daya yang memadai dan sejenisnya. Studi tentang administrasi publik penuh dengan panduan ini untuk manajemen yang efisien”.

Dengan demikian, jelas bahwa penjelasan pembuat kebijakan harus benar-benar mengetahui isi kebijakan, makna kebijakan, dan tujuan kebijakan agar pengertian tersebut tidak menyimpang dari politik.

b. Aspek organisasi

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan, organisasi bekerja untuk menciptakan lembaga, departemen, dan metode yang

diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Organisasi adalah kesatuan orang-orang yang bekerja dalam kerangka pemerintahan. Steven P. Robbins (1994; 4) juga mengatakan ini sebagai berikut:

“ organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan”.

Implementasi kebijakan memerlukan perintah atasan yang jelas dan tegas, dan sanksi bagi petugas yang melanggar, seperti yang dikatakan Jones (1991; 79-82) di bawah ini:

“ pemimpin untuk memberikan perintah yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan kewajiban-kewajiban tersebut dan kemudian dibagikan dalam cara yang tetap serta dibatasi secara ketat oleh aturan- aturan yang berhubungan dengan cara-cara pelaksanaan dan sejenisnya, yang akan dikenakan sanksi berupa pemecatan atau pembuangan bagi para pejabat yang melakukannya”.

Ada beberapa hal penting mengenai konsep birokrasi :

- 1) Sebuah sistem ideal birokrasi Weber masih jarang diterapkan, sehingga penting untuk diperhatikan implementasinya.
- 2) Implementasi adalah proses yang dinamis dan dapat berubah dalam berbagai cara.

Implementasi suatu kebijakan berbeda-beda dan tergantung pada eksekutif atau agensinya Charles O. Jones mencatat ini “*the point is that implementation of policy may very dependin on the particular stage of agency development*”.

Setiap kegiatan memerlukan birokrasi yang mampu berkomunikasi dengan pihak yang membuat kebijakan dan juga dengan pihak yang melaksanakan kebijakan. Tujuan organisasi adalah menjalankan program- program yang telah dirancang.

3) Aspek penerapan atau aplikasi

Penerapan atau application adalah penerapan secara konsisten semua keputusan dan peraturan dengan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan kebijakan. Jones (1991: 324) berpendapat bahwa aplikasi melibatkan, seperti tujuan pragmatis lainnya, "penyediaan barang dan jasa." Implementasi seringkali merupakan proses dinamis di mana para eksekutif dan staf secara khusus dipandu oleh instruksi dan indikator program atau kondisi khusus.

Courten mengatakan satu program akan berhasil jika ada tiga elemen untuk melaksanakan program tersebut. Pertama, kesesuaian program dan penggunaannya, yaitu apa yang ditawarkan program dan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pengguna). Kedua, korespondensi antara program dan organisasi pelaksana, yaitu korespondensi antara isu-isu yang dibutuhkan oleh program dengan kapabilitas organisasi pelaksana. Ketiga, korespondensi antara kelompok pengguna dan organisasi pelaksana, yaitu korespondensi antara kondisi yang diputuskan organisasi mendapatkan kinerja program dengan apa yang dapat dilakukan oleh tim sasaran program (Haedar Akib dan Antonius Tarigan, 2000: 12).

Berdasarkan pola yang dikembangkan oleh Corten, dapat dipahami bahwa implementasi program mungkin tidak sukses yang diharapkan jika tidak sesuai antara ketiga elemen implementasi kebijakan tersebut. Karena jika keluaran program tidak memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, jelas keluaran tersebut tidak dapat digunakan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diminta oleh program, organisasi tidak dapat memberikan hasil program dengan benar. Sebaliknya, jika persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, kelompok sasaran tidak akan menerima hasil program. Oleh karena itu, koordinasi antara ketiga elemen implementasi kebijakan menjadi penting agar program dapat berjalan sesuai rencana.

Mengukur Kebijakan RSBI dalam Kitab Islam Maryono (2010: 43) tentang Dasar dan Kualitas Hidup: Analisis Kritis Perkawinan Studi memiliki kriteria yang diperlukan untuk melihat apakah perkawinan berjalan dengan baik. dianggap, beberapa dari mereka :

- 1) Apakah unit pelaksana teknis telah disiapkan?
- 2) Apakah pelaksana kebijakan telah mengerti akan rencana, tujuan, dan sasaran kebijakan?
- 3) Apakah aktor-aktor utama telah ditetapkan dan siap menerima tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut?

- 4) Apakah koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik?
- 5) Hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab telah dilaksanakan atau dipahami dengan baik dan dilaksanakan oleh politisi ?
- 6) Ada tidaknya kriteria untuk mengevaluasi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang jelas dan dilaksanakan dengan baik?

Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan kebijakan publik ini merupakan upaya yang menekankan pada penetapan tujuan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien (efektif dan efektif) dalam sebuah pelayanan di bidang sertifikasi pertanahan yang sesungguhnya kepada masyarakat (*objective civilservice*).

Menurut Edward III (Subarsono, 2008; 90), faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan antara lain :

- 1) Komunikasi, hubungan antara pembuat kebijakan atau program dengan implementasi kebijakan, dan yang terpenting hubungan antara pelaksana program dan kelompok sasaran program.
- 2) Sumber adalah jumlah pelaksana yang akan memandu program dan kelompok sasaran untuk melaksanakan tindakan yang diharapkan dalam program.
- 3) Disposisi, kemauan pelaksana untuk menerima atau menolak,

atau keinginan pelaksana untuk melaksanakan program.

Struktur birokrasi diusulkan dan berguna oleh kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan untuk akan terus menerima dukungan besar dari kelompok sasaran jangka pendek.

6. Konsep Bantuan Stimulan Rumah Swadaya

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Ingash dan Bangunan Hunian, “Rumah Swadaya” disebut sebagai rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Menteri Negara Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Rumah Stimulan Sendiri Nomor 06 Tahun 2013, selanjutnya disebutkan bahwa insentif perumahan swadaya dengan ini disebut. menjadi BS. lembaga pemerintah berupa bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya Nomor 06 Tahun 2013, tujuan bantuan insentif perumahan adalah untuk membangun perumahan dan / atau lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah.

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013, pedoman penyelenggaraan perumahan swadaya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial.
- c. Sudah berkeluarga.
- d. Memiliki atau menguasai tanah.
- e. Belum memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni.
- f. Belum pernah mendapat bantuan stimulan perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat.
- g. Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
 - 1) Memiliki tabungan bahan bangunan
 - 2) Telah memulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan.
 - 3) Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS).
 - 4) Memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
 - 5) Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan perumahan swadaya.
 - 6) Dapat bekerja secara kelompok.

Pedoman pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya, berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013, antara lain disebut sebagai sumber bantuan insentif:

- a. Dana bantuan stimulan perumahan swadaya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi, atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota.
- b. Insentif perumahan perorangan dari APBN diberikan dalam DIPA Departemen Pekerjaan Umum pada Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Sebagaimana terlihat pada ayat (2), potensi dana dalam DIPA merupakan batas maksimal yang diberikan untuk pelaksanaan langkah-langkah dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 47 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus, diberikan insentif swadaya sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Swadaya Masyarakat
Bantuan pemerintah merupakan insentif untuk meningkatkan kualitas perumahan, hal ini diperlukan untuk menunjukkan kemandirian dan kesiapan masyarakat untuk memenuhi kualitas keterjangkauan perumahan. bantuan bahan bangunan dan properti lainnya yang dapat digunakan sebagai tambahan atau tabungan.
- b. Pemberdayaan Masyarakat
Penguatan masyarakat, dimulai dari perencanaan, pembinaan dan

pengelolaan pekerjaan, serta pengawasan partisipasi aktif masyarakat dengan rasa tanggung jawab penuh.

c. **Transparan**

Pengurusannya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan perangkat sehingga dapat dimonitor dan dievaluasi oleh semua pihak.

d. **Dapat dipertanggung jawabkan**

Manajemen bisnis harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.

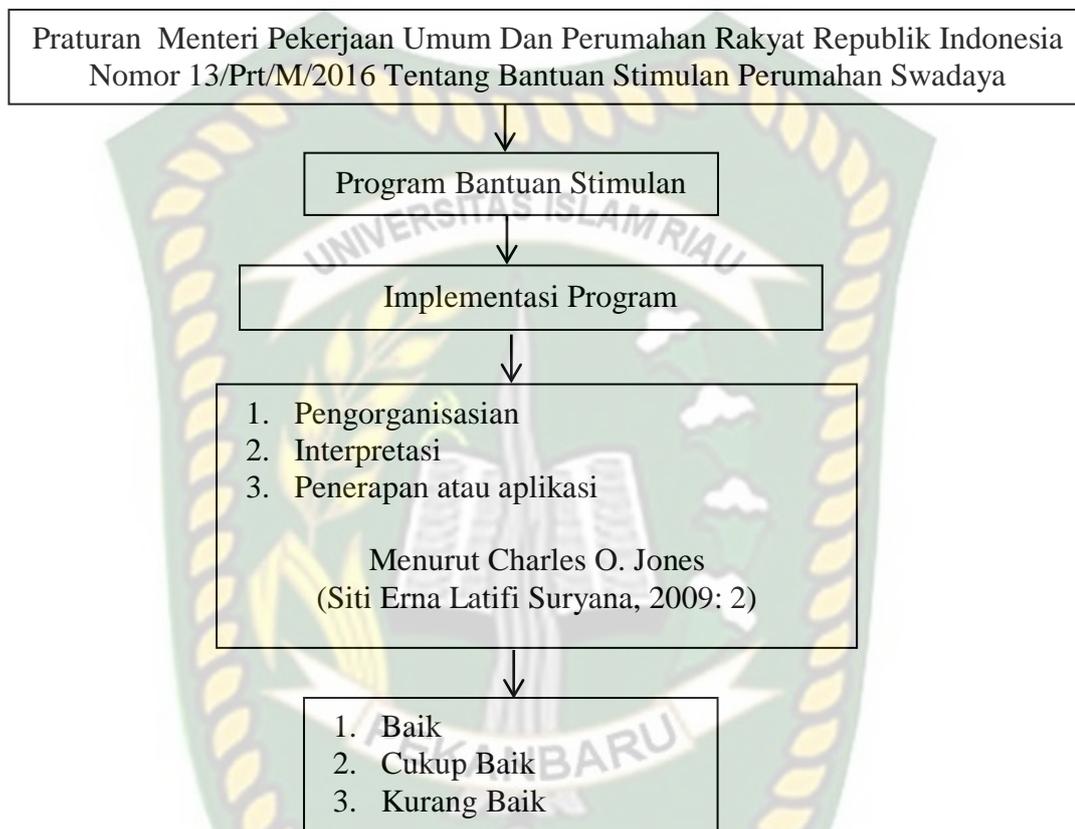
e. **Pengembangan Mandiri Pasca Kegiatan**

Pembangunan mandiri pasca konstruksi, start up / start up, dan swadaya pembangunan perumahan setelah selesainya program BPS yang dijalankan oleh masyarakat sendiri. Keberhasilan ini ditentukan oleh proses pemberdayaan masyarakat, mulai dari pelatihan mandiri hingga pasca konstruksi oleh KPB.

B. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir bertujuan untuk mendeskripsikan keterkaitan antara variabel penelitian dan variabel penelitian berdasarkan konsep dan teori yang dianggap relevan. Ketika sampai pada konsep menganalisis variabel dalam pekerjaan ini, seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini:

Gambar II.1 Kerangka pikir tentang Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang



Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

C. Konsep Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan konsep dan untuk menghilangkan kesalahpahaman pada istilah yang digunakan dalam karya ini, penulis mengklarifikasi konsep yang akan digunakan dalam hal ini sesuai dengan masalah yang dapat dipelajari dan masalah yang telah dipelajari terlihat seperti berikut ini:

- a. Administrasi adalah sebagai fungsi atau kegiatan (activity) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung

untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung di dalamnya.

- b. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.
- c. Manajemen adalah proses-proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planing, organizing, actuating dan controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran manajemen yang telah ditetapkan semula.
- d. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
- e. Pengorganisasian adalah Pelaksanaan program membutuhkan struktur organisasi yang jelas untuk membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan terampil.
- f. Interpretasi adalah Pelaksana perlu menjalankan program sesuai dengan spesifikasi teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

- g. Penerapan atau aplikasi adalah Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan programlainnya

D. Operasional Variabel

Operasional Variabel adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan (penggambaran) dari sudut suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

Tabel II.1 : Operasional variabel mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Implementasi program adalah salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan	Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	Pengorganisasian	1. Koordinasi dengan pihak terkait 2. Informasi mengenai program bantuan stimulan 3. Kemampuan petugas dalam menjalankan program	a. Baik b. Cukup baik c. Kurang baik
		Interprestasi	1. Sumber daya manusia 2. Sarana dan prasarana 3. Sosialisasi	a. Baik b. Cukup baik c. Kurang baik

		Penerapan atau aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketelitian dalam menetapkan calon penerima bantuan 2. Melakukan pendataan sebelum menetapkan calon penerima bantuan 3. Calon penerima sudah sesuai dengan kriteria 	<ol style="list-style-type: none"> a. baik b. Cukup baik c. Kurang baik
--	--	-------------------------	---	--

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

E. Teknik Pengukuran

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, perlu ditetapkan kriteria baik variabel maupun variabel.

1. Untuk pengukuran indikator ditetapkan ukuran-ukuran sebagai berikut:

Baik : bila semua indikator variabel telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dengan ukuran 70-100%.

Cukup baik : bila sebagian besar dari indikator variabel telah dilaksanakan atau dengan ukuran 45-69%.

Kurang baik : bila sebagian besar indikator belum terlaksana atau dengan ukuran dibawah 0-44%.

2. Untuk pengukuran sub indikator ditetapkan ukurannya sebagai berikut:

Pengorganisasi adalah Struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. dapat dikatakan:

Baik : bila semua indikator variabel telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dengan ukuran 70-100%.

Cukup baik : bila sebagian besar dari indikator variabel telah dilaksanakan atau dengan ukuran 45-69%.

Kurang baik : bila sebagian besar indikator belum terlaksana atau dengan ukuran dibawah 0-44%.

Interprestasi adalah Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai, dapat dikatakan:

Baik : bila semua indikator variabel telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dengan ukuran 70-100%.

Cukup baik : bila sebagian besar dari indikator variabel telah dilaksanakan atau dengan ukuran 45-69%.

Kurang baik : bila sebagian besar indikator belum terlaksana atau dengan ukuran dibawah 0-44%.

Aplikasi atau aplikasi diperlukan untuk menetapkan prosedur kerja tertentu untuk memastikan bahwa rencana kerja berjalan sesuai dengan rencana kerja sehingga tidak bertentangan dengan program lain:

Baik : bila semua indikator variabel telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dengan ukuran 70-100%.

Cukup baik : bila sebagian besar dari indikator variabel telah dilaksanakan atau dengan ukuran 45-69%.

Kurang baik : bila sebagian besar indikator belum terlaksana atau dengan ukuran dibawah 0-44%.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Menurut kueri penelusuran, jenis penelusuran yang digunakan adalah kueri penelusuran kuantitatif. Penelitian survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk meneliti seluruh populasi. Dengan demikian penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok, dan penelitian survey ini akan menuntun peneliti dalam membuat daftar pertanyaan berupa kuisisioner yang dimaksud diatas untuk disebarkan kepada populasi atau sampel yang sudah ditentukan. (Singarimbun, 2005;3)

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Alasan penulis mengambil di Desa Perawang Barat karena bahwa pelaksanaan program bantuan stimulan ini terlihat belum terlaksana dengan baik, sasaran penerima bantuan yang kurang tepat. Oleh karena itulah penulis memilih lokasi di Desa Perawang Barat tersebut.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005; 90). Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, staf seksi kesejahteraan masyarakat, masyarakat penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (kampung pinang sebatang, kampung meredan, kelurahan perawang, kampung tualang timur).

2. Sampel.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Menurut Singarimbun (2005; 53) “ sampel dapat diartikan sebagai kegiatan dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian”. Adapun sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1 Populasi Dan Sampel Pelaksana

No	Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	1	1	100 %
2	Bidang Perumahan dan Permukiman	1	1	100 %
3	Kepala Desa Perawang Barat	1	1	100 %
4	Kepala Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Perawang Barat	1	1	100 %

5	Masyarakat penerima bantuan	25	25	100 %
6	Masyarakat yang tidak menerima bantuan	42	42	100 %
Jumlah		71	71	100 %

Sumber : data olahan tahun 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi di gunakan sebagai sampel, menurut Sugiyono (2016; 85). Teknik ini seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah, Bidang Perumahan dan Permukiman, Kepala Desa Perawang Barat, dan Kepala Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Perawang Barat, Masyarakat penerima bantuan, Masyarakat yang tidak menerima bantuan.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan hasil penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

2. Data Sekunder

adalah data yang diperoleh melalui buku yang berkaitan dengan masalah penelitian dan dianggap perlu mengenai Analisis Pelaksanaan Program

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam karya ini, metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi dan informasi lengkap yang dibutuhkan oleh penulis, termasuk koneksi data langsung atau tidak langsung ke pusat penelitian, dan pengumpulan data penelitian :

1. Kuisisioner Salah satu cara untuk pengumpulan data dengan memberikan sejumlah daftar pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
2. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan cara mentransfer pertanyaan dan jawaban langsung kepada responden.
3. Dokumen adalah cara mengumpulkan informasi oleh subjek itu sendiri atau orang lain dengan melihat atau menganalisis dokumen yang relevan dengan dokumen ini.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyederhanakan pembacaan dan interpretasi data dengan cara yang lebih sederhana. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode deskripsi, yaitu metode analisis dilakukan dengan

mendeskripsikan data yang tersedia dari berbagai sumber dan menelusuri semua fakta terkait fenomena publik dan isu-isu terkait variabel dan indikator penelitian, tanggapan masyarakat, dan kajian penelitian. Setelah informasi dan bahan yang diperlukan telah terkumpul, kemudian disortir dan dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian datanya dianalisis dan diimplementasikan landasan teori dan konsep serta kaidah atau peraturan yang terkait dengan masalah penelitian, sehingga peneliti dapat sampai pada suatu kesimpulan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun rencana jadwal waktu kegiatan penelitian yang penulis lakukan adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang

No	Kegiatan	2020				2021											
		Desember				Jan-Maret				Apr-Jun				Jul-Sept			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Perbaikan UP																
4	Pembuatan daftar Kuisisioner																
5	Pengurusan rekomendasi penelitian																
6	Penelitian lapangan																
7	Penelitian dan analisis data																
8	Penyusunan laporan penelitian (skripsi)																
9	Konsultasi perbaikan skripsi																
10	Ujian skripsi																
11	Revisi dan perbaikan skripsi																
12	Penggandaan serta penyerahan skripsi																

Sumber: Pedoman Penulisan UP FISIPOL-UIR, 2021

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak

1. Sejarah Singkat Kabupaten Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 SM oleh Raja Kecil, putra Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, putra Johor Shah (Sultan Mahmud Syah), pusat Kerajaan Buntan. Nama Siak konon berasal dari salah satu jenis tumbuhan bernama Siak-Siak yang tersebar luas di sana. Sebelum Kerajaan Siak berdiri, wilayah Siak berada di bawah kendali Johor. Raja yang memerintah dan menguasai wilayah ini adalah seorang raja yang diangkat dan diangkat oleh sultan Orohor. Namun, wilayah tersebut belum memerintah selama hampir 100 tahun. Area tersebut dikendalikan oleh pelabuhan yang ditunjuk untuk mengumpulkan hutan dan makanan laut secara gratis.

Ia meninggal pada awal 1699 ketika Magat Sri Rama, Sultan Mahmud Shah II dari Kerajaan Johor, dibunuh, dan istrinya, Tuan Pong, sedang hamil pada saat itu dan dibawa ke Singapura, kemudian ke Jambi. Dalam perjalanan itu, Raja Kecil lahir dan besar di Kerajaan Minangkabau Pagaruyung. Sementara itu, Datuk Bendahara Tun Habib yang dikenal sebagai Sultan Abdul Jalil Riyat Syah mengambil alih kepemimpinan tertinggi Kerajaan Johor.

Ketika Raja Kechik beranjak dewasa, pada 1717, Raja Kechik berhasil naik takhta Johor. Namun pada tahun 1722, Kerajaan Johor dianeksasi oleh Tengku Suleiman, menantu Raja Kechik Sultan Abdul Jalil Riyadh Syah. Selama penaklukan Kerajaan Johor, Tengku membantu Sulaiman oleh sejumlah bangsawan Bugis. Terjadi perang saudara yang mengakibatkan kerugian besar di kedua belah pihak, sehingga pada akhirnya masing-masing pihak mundur. Sisi Johor Pahang, Raja Kechik Bintan mengundurkan diri dan menciptakan negara baru di tepi Sungai Buntan (kontribusi Sungai Siak). Inilah awal berdirinya kerajaan Siak di Buntan. Namun pusat Kerajaan Siak tidak terletak di Buntan.

Pusat kerajaan selalu berpindah-pindah dari Buntan ke Mempura, lalu ke Senapelan Pekanbaru dan lagi ke Mempura. Sultan Ismail dan Sultan Assyaidis Sarif Ishmael Jalil Jalaluddin (1827-1864) dipindahkan ke Siak Sri Indrapura, ibu kota Kerajaan Siak, dan akhirnya menetap di sana sampai masa pemerintahan Sultan Siak yang terakhir.

Sebuah istana megah dibangun di Siak pada masa pemerintahan Sultan ke-11, Sultan Assayaidis Syarief Hasim Abdul Jalil Syafuddin, yang memerintah dari tahun 1889 hingga 1908, dan istana tersebut diberi Istana Assyria Hashemiyah yang dibangun pada tahun 1889. Pemerintahan Sultan Sarif Hasim Siak mengalami kemajuan pesat, terutama di bidang ekonomi. Saat itu, Eropa, Jerman dan Belanda juga berkesempatan untuk berkunjung.

Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II). Bersamaan dengan deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia, ia mengibarkan bendera

merah putih di Istana Siak dan segera pergi ke Jawa untuk bertemu dengan Bung Karno, mendeklarasikan aksesinya ke Republik Indonesia di tangan Raja dan lebih dari 10.000 mahkota. Dia telah meninggalkan Siak dan menetap di Jakarta. Ia kembali ke Siak hanya pada tahun 1960 dan meninggal pada tahun 1968 di Rumbai.

Ia tidak meninggalkan keturunan dari kaisar pertama Tengku Agung atau kaisar kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997, Sultan Sarif Qasim II dianugerahi Penghargaan Pahlawan Nasional Kepahlawanan Republik Indonesia. Makam Sultan Sarif Qasim II terletak di tengah Siak Sri Indrapura, dekat Masjid Sultan, yaitu Masjid Syahabuddin.

Pada awal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kabupaten Siak. Baru pada tahun 1999 ibu kota Siak dialihkan ke Kabupaten Siak dan Kabupaten Siak berdasarkan UU Indrapura. 53 tahun 1999.

2. Luas dan Batas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Siak mencakup wilayah seluas 8.556,09 km² atau 9,74% dari luas wilayah Provinsi Riau yang merupakan kota terbesar ke-6 di Provinsi Riau. Ada pusat manajemen di Siak Sri Indrapura. Tahun 2014, Kabupaten Siak terdiri dari 14 Kecamatan, 9 Kelurahan, 114 Kelurahan, dan 8 Kelurahan Biasa.

Secara administratif batas wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

3. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Siak secara geografis terletak antara 1 16'30"LU-020'49"LU dan 100 54'21"BT-102 14'59"E, yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran. bagus di barat. Morfologi wilayah Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari data yang sebagian kecil terletak di bagian barat daya perbukitan. Morfologi dataran meliputi kurang lebih 60% dari luas wilayah Kabupaten Siak. Morfologi perbukitan rendah terdapat di bagian utara dan timur serta memanjang dari barat laut hingga tenggara.

4. Topografi

Kabupaten Siak terdiri dari satuan dataran rendah dan satuan perbukitan. Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah pada ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut, termasuk aliran sungai dan rawa, serta sedimen permukaan. Kemiringan lereng sekitar 0-3 atau bisa dikatakan hamper datar. Sedangkan satuan perbukitan mempunyai ketinggian antara 50-150 meter dari daerah sekitarnya dengan kemiringan 3-15.

5. Geologi

Kabupaten Siak merupakan bagian dari kawasan batuan sedimen bergelombang yang bergelombang. Batuan induk didominasi oleh tanah liat, silikon, batupasir dan kayu lapis. Formasi ini berada di wilayah Minas.

6. Klimatologi

Berdasarkan letak astronomi, Kabupaten Siak secara keseluruhan terletak di daerah tropis jika dilihat dari matahari, sehingga udara dominan di wilayah ini adalah 250 C sampai 320 C dan udara tropis lembab. 88,9% per bulan.

B. Gambaran Umum Kecamatan Tualang

1. Letak Geografis Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak memiliki keanekaragaman ekosistem darat dan perairan seperti hutan, rawa, sungai dan danau. Sebagian besar pendarat berupa dataran rendah dan rawa gambut. Karena Kabupaten Siak terletak di daerah ekuator, maka terdapat udara tropis antara 25–32 Celcius.

Dalam tahun 2003 Kabupaten Siak telah dimekarkan dari 3 kecamatan menjadi 8 kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kecamatan Siak dimekarkan menjadi 4 kecamatan yaitu:
 - 1) Kecamatan Tualang;
 - 2) Dayun;
 - 3) Kerinci Kanan dan
 - 4) Lubuk Dalam
- b. Kecamatan Minas dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu:
 - 1) Kecamatan Minasdan
 - 2) Kecamatan SeiMandau.
- c. Kecamatan Singuai Siak dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu:
 - 1) Kecamatan Sungai Apit,dan
 - 2) Kecamatan BungaRaya

Kecamatan Tualang merupakan pemekaran dari Kecamatan Siak, yang dimekarkan menjadi 13 Kecamatan :

- a. Kecamatan Siak;
- b. Kecamatan Tualang;

- c. Kecamatan Kerinci Kanan;
- d. Kecamatan Dayun;
- e. Kecamatan Sungai Apit;
- f. Kecamatan Minas;
- g. Kecamatan Kandis;
- h. Kecamatan Mandau;
- i. Kecamatan Mempura;
- j. Kecamatan Sabak Auh;
- k. Kecamatan BungaRaya;
- l. Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Lubuk Dalam

Perda Kabupaten Siak 2001, dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2001 oleh Pemerintah Daerah. Tujuan dari perluasan ini adalah untuk memudahkan masyarakat juga Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan hubungan administrasi, serta untuk pengembangan dan pencapaian pemerintahan kabupaten. Luas wilayah Kabupaten Tualang 0'32'-0'51' Lintang Utara 101'28'-101'52' Panjang Timur, Kabupaten Tualang luas wilayah 373,75 KM². Kabupaten Tualang terdiri dari 8 (delapan) desa dan 1 (satu) kelurahan, Hanya 15 km dari desa terjauh dari pusat pemerintahan kabupaten dan hanya 2 (dua) desa yaitu desa Maredan dan desa Tualang Timur. Kabupaten Tualang Terdiri dari pegunungan dan wilayah kecil perairan yang dihuni oleh suku lokal Riau. Kabupaten Tualang beriklim tropis dengan suhu minimum 23 'C-29' C dan tinggi 31'C-38'C.

Kecamatan Tualang terletak antara $0^{\circ}32'-0^{\circ}51'$ Lintang Utara dan $101^{\circ}28'-101^{\circ}52'$ Bujur Timur. Dengan wilayah lain yang berbatasan sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Kecamatan Minas;
 - b. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kerinci Kanan dan Lubuk Dalam;
 - c. Barat berbatasan dengan Kecamatan Minas dan Kota Pekanbaru
 - d. Timur berbatasan dengan Kecamatan Koto Gasip dan Lubuk Dalam
- Pusat pemerintahan di Kelurahan Perawang berjarak ± 70 KM dari Siak Sri Indrapura, dapat ditempuh melalui jalur sungai selama $\pm 1,5$ jam dan melalui jalur darat $\pm 1,5-2$ jam perjalanan dan pada tgl 21 Feb 2011 telah diresmikan Jembatan Maredan yang menghubungkan Perawang dengan Siak.

Wilayah Kabupaten Tualang, seperti halnya wilayah Kabupaten Siak lainnya, terdiri dari dataran rendah dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dangley humus dalam bentuk tanah rawa-rawa atau tanah basah. Kecamatan Tualang secara umum berada pada daerah dataran dimana sektor industri pengolahan merupakan motor penggerak perekonomian yang sangat dominan tidak saja bagi Kecamatan Tualang sendiri tapi juga menjadi sektor andalan Kabupaten Siak. Sehingga tidak berlebihan apabila daerah ini disebut daerah industry.

Masyarakat Perawang sebagian besar adalah pendatang dari bermacam suku dan agama. Perawang dulunya hanya sebuah desa kecil yang terisolir dari segi ekonomi maupun akses jalan . setelah masuk perusahaan besar seperti CALTEX ,IKPP sangat membanti pertumbuhan makro desa Perawang. Hingga saat ini pertumbuhan Perawang dikatakan stabil. ditandai dengan banyaknya pembangunan yang semakin merata.

Dikota ini terdapat pabrik kertas PT. Indah Kiat yang merupakan anak grup Sinarmas. Indah Kiat merupakan pabrik kertas dan bubur kertas utama di Indonesia. Pabrik ini telah memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat Perawang dan sekitarnya, baik langsung maupun tidak.

Namun kerusakan lingkungan penebangan kayu hutan yg menjadibahan baku pabrik menjadi sisi lain dari dampak keberadaannya. disamping itu, pabrik ini kerap dituding sebagai salah satu penyebab tercemarnya aliran sungai Siak.

Kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Spasial Hutan Penaburan Industri: 70 / Kpts-II / 95, secara umum 5% dari luas HTI yang ada dimiliki oleh hutan di Kabupaten Siak dan di Kecamatan Tualang. Diberikannya hak tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seputar hutan yang selama ini terpinggirkan.

2. Keadaan Penduduk

Per April 2014, terdapat 109.229 orang dengan 57.574 laki-laki dan 51.655 perempuan di Kabupaten Tualang, dengan 111 jenis kelamin.

Jumlah keluarga 26.186 keluarga, dan jumlah penduduk satu rumah tangga 4,17 dari total penduduk. 107.669 jiwa.

C. Gambaran Umum Desa Perawang Barat

Sejarah Desa Perawang Barat merupakan salah satu desa yang dibentuk oleh pemekaran desa induk yaitu Desa Tualang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2002. Areal Desa Perawang Barat sebelum dipisahkan dari desa induk ini adalah desa yang tertinggal dalam pembangunan infrastruktur pedesaan, yang merupakan hasil dari perluasan ini. Desa Perawang Barat saat ini mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan dan perekonomian yang didukung oleh sejumlah faktor, seperti posisi Perawang Barat yang strategis. Kecamatan, serta Kabupaten, Desa Jalan Raya Perawang yang merupakan bagian dari wilayah tersebut, mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan penduduk setiap bulannya yang terus bertambah sesuai dengan pembangunan perumahan / perumahan sektor swasta.

Luas wilayah Perawang Barat 45,18 km², jarak desa dan pemerintahan kabupaten 2 km dan dapat ditempuh dalam waktu 5 menit, jarak desa dengan pusat pemerintahan kabupaten bisa 40 km. Jarak desa dengan pemerintah provinsi dalam 30 menit adalah 30 menit Jarak yang ditempuh dalam 35 menit adalah 12 km antara Pusat Pemerintahan Desa dan Pusat Dusun terjauh. Dilihat dari bentang wilayah, Desa Perawang Barat mempunyai batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pinang Sebatang Barat;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Perawang;

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan MeredanBarat;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan KecamatanMinas.

Jumlah penduduk Desa Perawang Barat telah menunjukkan peningkatan jumlah penduduk di wilayahnya setiap tahun antara tahun 2017-2019 dengan penambahan jumlah penduduk yang merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya di meningkatkan produksi, menyediakan keahlian, kepemimpinan, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menciptakan aktivitas ekonomi dan konsumsi. Tanda-tanda pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi pendidikan, dan semakin besar jumlah penduduk di suatu wilayah maka semakin tinggi jumlah dan jumlah lembaga pendidikan.

Tingkat pendidikan di Desa Perawang Barat masih rendah. Berdasarkan tingkat pendidikan penduduk, mayoritas penduduk ada di SMA / SMK / sederajat yaitu 7.245 jiwa, tingkat pendidikan (S2) terendah sekitar 5 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Perawang Barat masih rendah bagi Bangsa yang ingin maju.

Penduduk lokal di Desa Perawang Barat sebagian besar adalah Melayu, beragama Islam. Suasana religius tampak sangat hidup di kalangan masyarakat. Hal itu ditandai dengan dibuatnya tempat ibadah sebagai sarana peningkatan iman kepada Tuhan. Adapun bagi mereka yang memiliki agama selain Islam, hanya sebagian kecil dari mereka dan pendatang merupakan bangsa yang memprioritaskan pendidikan rakyatnya. Pendidikan yang buruk merupakan tantangan utama dalam pembangunan pedesaan di Desa Perawang Barat.

Masyarakat Desa Perawang Barat di Kabupaten Tualang merupakan komunitas religius yang kuat, dengan hampir setiap kota memiliki tempat ibadah dan upacara keagamaan lainnya, termasuk tempat pertemuan dan sejumlah masjid serta Mushalla yang digunakan untuk berdiskusi tentang meningkatkan desa.

Budaya adalah hasil kreativitas, cita rasa, dan inisiatif. Budaya memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena budaya muncul dari potensi budaya masyarakat.

Kebudayaan daerah merupakan cerminan dari tradisi yang berhubungan dengan kehidupan manusia dalam kehidupan dan bersumber dari hasil penelitian kreatif manusia. Oleh karena itu, budaya daerah sangat erat kaitannya dengan sistem. Penduduk Desa Perawang Barat tidak lepas dari pengaruh budaya yang dibawa dari luar, namun mereka melestarikan budaya yang telah diwariskan secara turun temurun tanpa merusak hubungan masyarakat dengan ahli waris budaya lain. Hal tersebut terlihat dengan menjaga keharmonisan hidup antara Suku Melayu Tualang. Masyarakat sangat mendukung persaudaraan melalui pengenalan sistem kekerabatan.

Kehidupan penduduk Desa Perawang Barat bervariasi, namun didominasi oleh petani, pegawai swasta, aparatur pemerintah dan lain-lain. Cara penggunaan lahan di Desa Perawang Barat biasanya untuk pertanian, peternakan, tanah subur, sekolah, tempat ibadah dan rumah kesehatan. Sementara itu, penduduk Desa Perawang Barat yang memiliki ternak, dari 4.686 KK yang ada, 20% KK menggantungkan mata pencahariannya sebagai mata pencaharian, sedangkan

sebagian mata pencahariannya juga digunakan untuk merumput di antara sapi, itik petelur dan petelur, sapi jantan, ayam lokal, ayam dan ayam lokal.

Indikator dan data tentang situasi sosial ekonomi penduduk diperlukan untuk merumuskan kebijakan pembangunan di berbagai bidang, terutama yang relevan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan informasi yang beragam ini maka perencanaan kebijakan pembangunan akan lebih terkonsentrasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Terdapat fasilitas yang digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk menunjang berbagai aktivitas yang ada di masyarakat desa Perawang Barat.

Terciptanya usaha budidaya ikan dengan sistem tambak, keinginan untuk meningkatkan pendapatan keluarga masyarakat Desa Perawang Barat di Kabupaten Tualang. Perkembangan ikan tambak di Desa Perawang Barat telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat saat ini, selain dapat meningkatkan pendapatan keluarga, usaha tambak di Desa Perawang Barat juga berperan penting dalam menunjang kesejahteraan keluarga.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Pada bab V ini penulis akan menjelaskan atau menggambarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan cara pengumpulan data dengan penyebaran angket dan melakukan wawancara secara langsung kepada responden dengan turun langsung kelapangan. Namun sebelum memasuki hasil dari penelitian penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu identitas dari responden yang penulis anggap merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian. Adapun identitas responden yang ingin penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan umur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Usia

No	Tingkat umur	Jumlah	Persentase
1	17-30	5	7.46%
2	31-40	38	56.71%
3	41-54	23	34.33%
4	>55	1	1.50 %
Jumlah		67	100%

Sumber : data olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat diketahui identitas responden berdasarkan umur adalah dari 67 orang yang dijadikan sebagai responden

sebanyak 5 orang (7.46 %) berusia antara 17-30 tahun, sebanyak 38 orang (56.71 %) berusia antara 31-40 tahun dan sebanyak 23 orang (34.33 %) berusia antara 41-54 tahun dan sebanyak 1 orang (1.50%) berusia >55 tahun keatas. Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa identitas responden berdasarkan usia di dominasi oleh responden yang berusia antara 31-40 tahun.

Maka dari gambaran data umur diperoleh dari responden tersebut, bahwa responden yang digunakan dalam penelitian ini tergolong usia dewasa atau matang dalam berfikir. Sehingga dalam pengambilan suatu keputusan responden tidak lagi mudah dipengaruhi orang lain dan secara kejiwaan mempunyai kematangan dan pengalaman di dunia kesehatan.

2. Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Identitas responden pada jenjang pendidikan diperlukan guna memberikan gambaran mengenai identitas para responden yang akan menjawab maksud dari penelitian ini. Faktor pendidikan memegang peranan sangat penting bagi penulis dalam upaya untuk memperoleh pengetahuan terhadap hasil jawaban yang diberikan responden karena menurut penulis orang yang berpendidikan umumnya akan lebih tinggi pengetahuan dan lebih bijaksana membandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah walaupun hal ini tidal mutlak menjadi kebenaran karena bagitu pentingnya pendidikan dalam mempengaruhi pikiran dan sikap seseorang, melalui data tabel berikut akan dapat diketahui gambaran dari tingkat pendidikan responden. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terlihat bahwa jenjang

pendidikan responden terdiri dari rendah sampai pada pendidikan tinggi, untuk mengetahui responden dapat dilihat rincian datanya pada tabel berikut: Jenis kelamin pada penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki sebagaimana informasi pada tabel berikut:

Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	10	14.93%
2	SLTP	7	10.45%
3	SLTA	37	55.22%
4	Strata 1	13	19.40%
Jumlah		67	100%

Sumber : Data olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat diketahui identitas responden berdasarkan jenjang pendidikan adalah dari 67 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 10 orang (14.93 %) berpendidikan SD, sebanyak 7 orang (7 %) berjenjang pendidikan SLTP, sebanyak 37 orang (55.22%) berjenjang pendidikan SLTA dan sebanyak 13 orang (19.40%) berjenjang pendidikan Strata1. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa identitas responden berdasarkan jenjang pendidikan didominasi oleh responden yang berjenjang pendidikan SLTA.

3. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Perempuan	38	56.72 %
2	Laki-Laki	29	43.28 %
Jumlah		67	100 %

Sumber : data olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel V.4 diatas dapat diketahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin adalah dari 67 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 38 orang atau 56.72 % berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 29 orang atau 43.28 % berjenis kelamin laki-laki. Dari identitas responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya identitas responden berdasarkan jenis kelamin di dominasi oleh responden yang berjenis kelamin perempuan.

B. Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Dan Perumahan Kabupaten Siak Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang

Ketidakmerataan dalam pembangunan nasional sesungguhnya tidak terlepas dari kemiskinan. Bila dalam suatu pembangunan mengabaikan pemerataan ekonomi maka dampak yang timbul dari pembangunan tersebut adalah masalah-masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas kesejahteraan jasmani, rohani, dan emosi, kehidupan dan lingkungan yang baik dan sehat, serta hak atas pemeliharaan kesehatan. Rumah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Gedung Hunian serta Bangunan

Perumahan yang merupakan hasil revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjadi dasar bagi pembangunan pemerataan dan pemerataan perumahan. kebutuhan. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pekerjaan Umum yang berganti nama menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2014 telah mencanangkan Program Bantuan Stimulasi Sendiri (BSPS) berbiaya rendah. Pendapatan masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.14 Tahun 2011.

Salah satu daerah yang mendapatkan BSPS adalah di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. akan tetapi masih ada yang kurang pantas menerima bantuan tersebut, sedangkan yang berhak menerima tidak mendapatkan bantuan. Pada umumnya masyarakat sangat peka terhadap program bantuan pemerintah dan mereka berusaha untuk menjadi sasaran bantuan tersebut. Dengan program ini masyarakat dengan latar belakang berpenghasilan rendah mendapat bantuan untuk perbaikan kondisi rumah.

Untuk mengetahui pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, penulis telah menetapkan beberapa indikator yang telah penulis tetapkan yaitu dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini:

1. Pengorganisasian

Menurut Charles O. Jones, indikator implementasi yang pertama adalah organisasi. Di sini Charles O. Jones menjelaskan bahwa organisasi melibatkan pembentukan dan pengurutan sumber daya, bagian, dan metode

untuk mendukung program yang sedang berjalan. Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, aspek organisasi dapat dilihat dari koordinasi, pengetahuan informasi dan kemampuan petugas dalam melaksanakan program bantuan.

Untuk mengetahui tanggapan responden dari pelaksana mengenai organisasi dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

Tabel V.4 Tanggapan Responden Tentang Indikator Pengorganisasian Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Nilai Penilaian	Kategori Penilaian		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Bagaimanakah koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (studi di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang) ?	35	31	1
2	Informasi mengenai program bantuan stimulan dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (studi di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang) ?	24	41	2
3	Kemampuan petugas dalam menjalankan program bantuan stimulan perumahan swadaya oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,	28	39	0

Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (studi di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang)?			
Jumlah	87	111	3
Rata-rata	29	37	1
Persentase	43.28 %	55.22 %	1.49 %

Sumber: Olahan Data, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tanggapan responden tentang indikator pengorganisasian dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak didominasi oleh jawaban Cukup baik sebanyak 111 kali dengan rata-rata 37 serta persentase sebesar 55.22%.

Hal ini terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang sudah masuk ke dalam kategori penerima akan tetapi tidak dimasukkan ke dalam daftar penerima bantuan. Selain itu juga Tim Fasilitator Lapangan kurang berkoordinasi dengan RT dan RW setempat untuk mendata masyarakat yang benar benar layak mendapatkan bantuan tersebut.

Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari koordinasi yang dilakukan serta kemampuan petugas dalam menetapkan penerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah

mengenai organisasi pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah

“dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini, struktur organisasi dari tingkat pusat hingga tingkat desa meliputi kelompok kerja pusat, kelompok kerja provinsi, kelompok kerja kabupaten, tim fasilitator lapangan, serta kelompok swadaya masyarakat. Selain itu dalam penyaluran dana kita juga melibatkan bank penyalur bantuan dan toko penyalur bahan bangunan. Menurut saya semua itu sudah cukup kompeten dalam pelaksanaan program ini (wawancara dengan Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Pemukiman Daerah pada tanggal 14 Oktober 2020).”

Sejalan dengan hal diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa mengenai organisasi pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah adalah:

“.....menurut saya, mengenai organisasi dalam pelaksanaan program ini cukup baik. Yang mana pelaksanaan ini dibantu oleh Tim Fasilitator Lapangan yang mendampingi penerima bantuan.

Tim ini sangat membantu dalam pelaksanaan program. Anggota Tim Fasilitator Lapangan bukan dari pemerintah daerah mbak, akan tetapi dari masyarakat umum yang memenuhi kriteria. Jadi menurut mengenai organisasi dalam pelaksanaan program sudah cukup memahami dan berkompenten.”

(wawancara dengan Kepala Desa Perawang Barat tanggal 21 Oktober 2020)

Dari hasil kuisisioner dan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa organisasi pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dilihat dari peran Tim Fasilitator Lapangan dalam pelaksanaan program yang sangat membantu para penerima bantuan dari porses

menerima bantuan sehingga pelaksanaan program menjadi efektif dan efisien.

2. Aspek Interpretasi

Menurut Charles O. Jones, indikator implementasi yang pertama adalah interpretasi. Di sini Charles O. Jones mengatakan bahwa tugas program komentar (seringkali dalam hal status) untuk mengimplementasikan dan melaksanakan rencana yang tepat dan kebijakan penjelas yang dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan program stimulus perumahan swadaya di Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. aspek interpretasi dapat dilihat dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sosialisasi program bantuan stimulan.

Untuk mengetahui tanggapan responden dari pelaksana mengenai interpretasi dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

Tabel V.5 Tanggapan Responden Tentang Indikator Aspek interpretasi Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Nilai Penilaian	Kategori Penilaian		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Sumber daya manusia terkait program bantuan stimulan perumahan swadaya oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (studi di Desa Perawang Barat	28	34	5

	Kecamatan Tualang) ?			
2	Bagaimanakah Sarana dan prasarana dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (studi di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang) ?	31	32	4
3	Bagaimanakah sosialisasi dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (studi di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang) ?	31	32	4
Jumlah		90	99	12
Rata-rata		30	33	4
Persentase		44.78%	49.25%	5.97%

Sumber: Olahan Data, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tanggapan responden tentang indikator aspek interpretasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak didominasi oleh jawaban Cukup baik sebanyak 99 kali dengan rata-rata 33 serta persentase sebesar 49.25%.

Hal ini terlihat dari sumber daya manusia yang cukup memadai dan sarana prasarana sudah mendukung dalam pelaksanaan program bantuan tersebut. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dikatakan kurang baik.

Penerapan dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat

dikatakan cukup baik. Hal ini dilihat dari sarana prasarana dan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah mengenai penerapan pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah:

“untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni ada alurnya mbak ,jadi disini desa melalui ketua RT/RW mendata warganya yang kira-kira masuk kriteria rumah tidak layak huni, selanjutnya data warga yang telah terkumpul dikirim ke kecamatan, dari kecamatan diteruskan ke dinas selanjutnya tim teknis dari dinas melakukan survei lapangan, kemudian data dari kecamatan kita validasi dan kemudian kita serahkan kekecamatan untuk diteruskan kedesa kemudian warga sudah sudah memenuhi kriteria mendapatkan bantuan wajib membuka rekening bank riau untuk penyaluran dana. Jadi seperti itulah pendataana yang kami lakukan (wawancara dengan Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Pemukiman Daerah pada tanggal 14 Oktober2020).”

Sejalan dengan hal diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa mengenai penerapan pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah adalah

“.....untuk alur permohonan calon penerima bantuan wajib menyertakan fotokopi KTP, KK dan foto keadaan rumah sebelum mendapatkan program dna surat atas kepemilikan tanah. Untuk proses kita mendata rumah warga yang tidak layak huni selanjutnya kita serahkan ke Kecamatan dan dari kecamatan akan diteruskan ke dinas, gitu mbak.”

(wawancara dengan Kepala Desa Perawang Barat tanggal 21 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil kuisisioner dan hasil wawancara yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pelaksanaan

bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dilihat dari kesesuaian penerima bantuan dan pendataan yang dilakukan oleh pihak desa yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penerapan atau Aplikasi

Menurut Charles O. Jones, indikator ketiga. Charles O. Jones menjelaskan bahwa aplikasi / aplikasi berkaitan dengan kinerja pekerjaan, yang meliputi "penyediaan barang atau jasa" dan tujuan pragmatis lainnya. Pelaksanaan yang sering dilaksanakan oleh para pengurus dan staf didasarkan pada pedoman dan indikator program, atau pada kasus di Desa Perawang Barat di Kecamatan Tualang, di Kabupaten Siak Aspek Desa Perawang Barat di Desa Kabupaten Siak. Penerapan / aplikasi dapat dilihat pada pelaksanaan program BSPS, prosedur pendanaan dan penyaluran dana BSPS, serta hasil pelaksanaan program BSPS di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Untuk mengetahui tanggapan responden dari pelaksana mengenai penerapan dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

Tabel V.6 Tanggapan Responden Tentang Indikator Penerapan atau Aplikasi Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Nilai Penilaian	Kategori Penilaian		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Bagaimanakah ketelitian dalam menetapkan calon penerima bantuan dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (studi di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang) ?	11	32	24
2	Bagaimanakah pendataan sebelum menetapkan calon penerima bantuan dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (studi di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang) ?	11	48	8
3	Bagaimanakah calon penerima sudah sesuai dengan kriteria dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (studi di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang) ?	17	34	16
Jumlah		39	114	48
Rata-rata		13	38	16
Persentase		19.4%	56.72%	23.88%

Sumber: Olahan Data, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tanggapan responden tentang tanggapan responden tentang indikator penerapan atau aplikasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak didominasi oleh

jawaban Cukup baik sebanyak 114 kali dengan rata-rata 38 serta persentase sebesar 59.72%.

Hal ini terlihat dari sumber daya manusia yang cukup memadai dan sarana prasarana sudah mendukung dalam pelaksanaan program bantuan tersebut. penerapan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dikatakan kurang baik.

Penerapan dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dilihat dari sarana prasarana dan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah mengenai penerapan pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah:

“untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni ada alurnya mbak ,jadi disini desa melalui ketua RT/RW mendata warganya yang kira-kira masuk kriteria rumah tidak layak huni, selanjutnya data warga yang telah terkumpul dikirim ke kecamatan, dari kecamatan diteruskan ke dinas selanjutnya tim teknis dari dinas melakukan survei lapangan, kemudian data dari kecamatan kita validasi dan kemudian kita serahkan kekecamatan untuk diteruskan kedesa kemudian warga sudah sudah memenuhi kriteria mendapatkan bantuan wajib membuka rekening bank riau untuk penyaluran dana. Jadi seperti itulah pendataana yang kami lakukan (wawancara dengan Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Pemukiman Daerah pada tanggal 14 Oktober2020).”

Sejalan dengan hal diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa mengenai penerapan pelaksanaan bantuan stimulan perumahan

swadaya di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah adalah

“.....untuk alur permohonan calon penerima bantuan wajib menyertakan fotokopi KTP, KK dan foto keadaan rumah sebelum mendapatkan program dan surat atas kepemilikan tanah. Untuk proses kita mendata rumah warga yang tidak layak huni selanjutnya kita serahkan ke Kecamatan dan dari kecamatan akan diteruskan ke dinas, gitu mbak.”

(wawancara dengan Kepala Desa Perawang Barat tanggal 21 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dilihat dari kesesuaian penerima bantuan dan pendataan yang dilakukan oleh pihak desa yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Pembahasan

Secara keseluruhan diketahui bahwa tanggapan responden didominasi oleh jawaban dengan kategori Cukup Baik sebagaimana informasi yang diberikan pada tabel berikut:

Tabel V.7 Rekapitulasi tanggapan responden tentang Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Dan Perumahan Kabupaten Siak Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang

No	Indikator	Tanggapan Responden		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Pengorganisasian	29	37	1
2	Interpretasi	30	33	4
3	Penerapan atau Aplikasi	13	38	16
Jumlah		72	108	21

Rata-rata	24	36	7
Persentase	35,82%	53,73%	10,45%

Sumber: Olahan Data, 2021

Secara keseluruhan tentang penelitian tentang pelaksanaan Program Perumahan Swadaya Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Dan Perumahan Kabupaten Siak Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang yakni pada hasil akhir tergolong pada kategori cukup baik yaitu dengan jumlah total 108 dengan rata-rata sebanyak 36 dengan persentasi sebesar 53.73%.

Hal ini di tandai dengan dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari koordinasi yang dilakukan serta kemampuan petugas dalam menetapkan penerima bantuan. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Didesa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari koordinasi yang dilakukan serta kemampuan petugas dalam menetapkan penerima bantuan.

Hal ini juga dilihat dari kesesuaian penerima bantuan dan pendataan yang dilakukan oleh pihak desa yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sumber daya manusia yang cukup memadai dan sarana prasarana sudah mendukung dalam pelaksanaan program bantuan tersebut. penerapan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dikatakan kurang baik.

BAB VI

PENUTUP

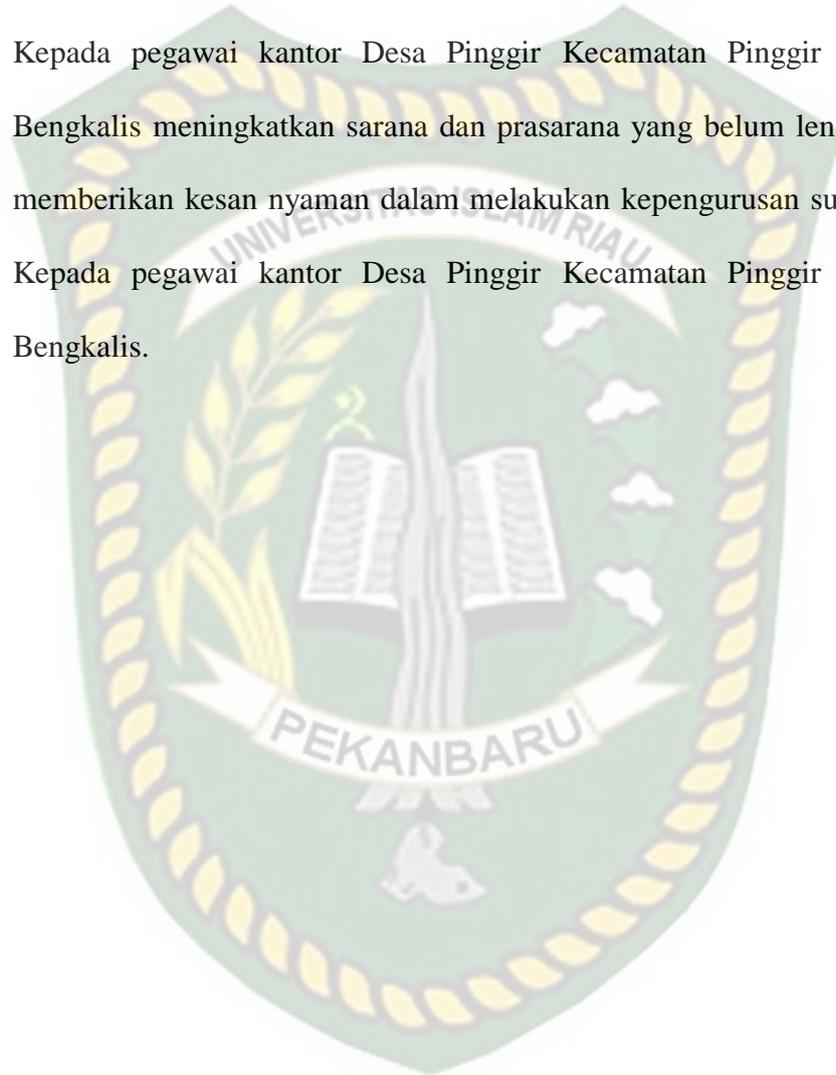
A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Pelayanan Publik Pada Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis pada hasil akhir tergolong pada kategori cukup baik yaitu dengan jumlah total 108 dengan rata-rata sebanyak 36 dengan persentasi sebesar 53.73%. Hal ini terlihat dari persentasi responden di dominasi oleh jawaban cukup baik sebanyak 20 orang responden dengan persentase sebesar 50 %. Hal lain juga diketahui bahwa Pinggir menempati gedung baru yang masih membutuhkan pembangunan terkait fasilitas pendukung pelayanan masyarakat. Kantor desa Pinggir sistem kerja sudah menggunakan komputerisasi. Hal ini bermaksud untuk memudahkan pekerjaan dan mengamankan data-data penting kantor desa Pinggir. Salah satu unsur pelayanan yang diberikan oleh kantor Desa Pinggir dalam membangun rasa kedekatan dengan masyarakat sehingga dapat memberikan kenyamanan pada masyarakat. Keramahan dan ketegasan dalam menghadapi masyarakat yang ingin cepat dilayani dengan penyelesaian dalam waktu dekat dan memberikan pengertian kepada masyarakat untuk mengantri dan bersabar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pegawai kantor Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis meningkatkan kinerjanya untuk menghindari ketidaktepatan waktu karena terkadang kepala desa tidak berada di kantor.
2. Kepada pegawai kantor Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis meningkatkan sarana dan prasarana yang belum lengkap untuk memberikan kesan nyaman dalam melakukan kepengurusan surat-surat di
Kepada pegawai kantor Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.



Daftar Pustaka

Buku:

- Arif Rohman. 2009. Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: LaksBang Mediatama
- Charles. O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) Terjemahan Rick yIsmanto, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada
- Gitosudarmo, Indriyo. 2000. Manajemen Pemasaran. BPFE. Yogyakarta. Ghozali
- Haedar dan Antonius Tarigan. 2012. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif Model dan Kriteria Pengukurannya. Jurnal
- Pasolong, Harbani. 2016. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. 2012. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Ketiga. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Robbins, Stephen P., 1994. Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi, Alih. Bahasa Jusuf Udaya. Jakarta : Arcan
- Safroni, 2012, Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia (Teori, Kebijakan, dan Implementasi), Yogyakarta : Aditya Media
- Sagala, Syaiful. 2007. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung: CV. ALFABETA
- Singarimbun Efendi, Sofyan, 2005, Metode Penelitian Survey, Pustaka. LPJES
- Solihin, Ismail. 2009. Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability. Salemba Empat
- Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik, Jakarta: Erlangga

Umar. 2005. Metode Penelitian Untuk Tesis Dan Bisnis, Jakarta: Grafindo. Persada

Wibowo. 2009. Manaemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Pers.

Zulkifli. 2005. Manajemen Sistem Informasi. Jakarta: Gramedia Pustaka

Undang-undang:

Peraturan Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian tugas pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Khyakimlik / Kota / Kota

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Ingash dan Bangunan Hunian

Peraturan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Rumah Stimulan Sendiri Nomor 06 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 47 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus

Jurnal:

Erna Latifi Suryana. 2009. Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang. Tesis, Program Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan